

Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Pertanian Terpadu di Kabupaten Pinrang

Muh. Rafly Syahdinrah

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: muhraflixxyahdinrah@gmail.com

Abstract

The agricultural sector plays a strategic role in supporting regional economic development, particularly in Pinrang Regency, which is recognized as one of the major agricultural areas with significant potential in food crops and horticultural commodities. However, efforts to increase agricultural productivity continue to face various challenges, including limited access to agricultural technology, inadequate production facilities, insufficient training opportunities, and weak institutional capacity among farmers. This study aims to analyze the role of the Pinrang Regency Government in the development of food crop and horticultural subsectors, as well as the provision of agricultural machinery and equipment. The study employed a qualitative descriptive approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving officials from the Food Crops, Horticulture, and Plantation Office, farmer groups, and individual farmers. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Pinrang Regency Government has implemented various agricultural development programs, including the provision of superior seeds, integrated agricultural extension services, agricultural machinery assistance, and farmer group mentoring. These programs have contributed to improving agricultural productivity and farming efficiency. Nevertheless, several challenges remain, such as limited regional budgets, weak inter-agency coordination, and unequal distribution of assistance among farmers. Therefore, stronger collaboration among stakeholders, improved extension and mentoring services, and evidence-based policymaking are required to support sustainable agricultural development in Pinrang Regency.

Keywords: Local Government, Food Crops; Horticulture, Agricultural Machinery and Equipment, Agricultural Policy, Pinrang Regency.

Abstrak

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama di Kabupaten Pinrang yang dikenal sebagai salah satu daerah agraris dengan potensi besar pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Namun, peningkatan produktivitas pertanian masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya akses petani terhadap teknologi pertanian, keterbatasan sarana produksi, minimnya pelatihan, serta belum optimalnya penguatan kelembagaan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, kelompok tani, serta petani. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah melaksanakan berbagai program pengembangan pertanian melalui penyediaan bibit unggul, penyuluhan pertanian terpadu, bantuan alsintan, serta pendampingan kelompok tani. Program-program tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum meratanya

distribusi bantuan kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas pendampingan, serta penyusunan kebijakan berbasis data untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Tanaman Pangan, Hortikultura, Alat dan Mesin Pertanian, Kebijakan Pertanian, Kabupaten Pinrang.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah agraris utama di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan regional dan nasional. Keberhasilan sektor pertanian di daerah ini sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan pertanian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tani. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan pertanian, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi strategis dalam bentuk program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung akar permasalahan di lapangan. Tanpa campur tangan pemerintah yang terarah dan konsisten, sektor pertanian akan sulit berkembang secara berkelanjutan dan berdampak luas terhadap kesejahteraan petani.

Sektor tanaman pangan dan hortikultura menjadi tumpuan utama kehidupan mayoritas penduduk Kabupaten Pinrang yang bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas seperti padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah menjadi hasil pertanian unggulan daerah yang tidak hanya dikonsumsi lokal, tetapi juga disuplai ke berbagai daerah lain di Sulawesi. Namun, peningkatan produksi belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Berbagai kendala teknis dan non-teknis masih mewarnai dinamika pertanian daerah ini, mulai dari keterbatasan sarana produksi, ketergantungan terhadap pola pertanian tradisional, hingga lemahnya sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Permasalahan mendasar lainnya yang dihadapi petani adalah rendahnya akses terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) yang modern dan efisien. Alsintan menjadi kunci transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern yang berdaya saing tinggi. Namun, belum meratanya distribusi alsintan, kurangnya kemampuan petani dalam mengoperasikan dan merawat alsintan, serta minimnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah menjadi penghambat utama dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu, keberlanjutan program alsintan juga sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kelembagaan petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) juga belum sepenuhnya mampu menjalankan peran strategisnya dalam menyerap dan mendistribusikan program-program pemerintah. Banyak kelompok tani yang masih bersifat administratif, hanya aktif ketika ada bantuan program, dan belum memiliki sistem manajemen internal yang kuat. Lemahnya kapasitas kelembagaan ini berimplikasi langsung pada rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pertanian, karena kelompok tani seharusnya menjadi mitra utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan petani.

Di sisi lain, penyuluhan pertanian sebagai instrumen edukasi dan pendampingan petani belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata. Jumlah penyuluh yang terbatas, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya fasilitas kerja menjadi kendala utama dalam mendekati informasi, teknologi, dan inovasi pertanian kepada masyarakat tani. Padahal, keberadaan

penyuluh sangat vital dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Tanpa dukungan penyuluhan yang kuat, petani cenderung kembali pada pola budidaya lama yang tidak efisien dan rentan terhadap perubahan iklim serta fluktuasi harga pasar.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat sentral dalam mengakselerasi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Pinrang. Pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan bantuan secara fisik seperti benih atau alsintan, tetapi juga harus membangun sistem pendukung yang berkelanjutan, termasuk penguatan kelembagaan petani, penyediaan informasi dan teknologi, serta pelatihan berbasis kebutuhan lokal. Upaya-upaya tersebut perlu dirancang dalam sebuah kerangka kebijakan yang integratif dan melibatkan partisipasi aktif dari petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pinrang, dalam mendorong pengembangan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan penyediaan alsintan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan serta menggali potensi inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam

pengembangan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Lokasi penelitian dipusatkan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pinrang, dengan waktu pelaksanaan selama dua bulan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive, seperti kepala dinas, kepala bidang, serta kelompok tani. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, laporan kegiatan, serta regulasi daerah terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merumuskan Kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Penyediaan Alat Mesin Pertanian

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian berbasis potensi lokal. Perumusan kebijakan ini menjadi fondasi dalam merancang program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan visi pembangunan daerah semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi petani, perubahan iklim, serta tantangan globalisasi sektor pertanian. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan stakeholder pertanian, mulai dari akademisi, penyuluh, hingga petani itu sendiri.

Substansi utama dalam perumusan kebijakan difokuskan pada tiga aspek pokok, yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, pengembangan komoditas hortikultura unggulan, dan penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) yang sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah menetapkan prioritas

program berdasarkan evaluasi tahunan terhadap capaian produksi, tingkat serapan pasar, serta potensi ekspor yang dapat dikembangkan. Dalam penyusunan kebijakan, aspek efisiensi dan keberlanjutan menjadi landasan penting, agar program tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Kebijakan diarahkan pada transformasi pertanian dari sistem tradisional ke arah modern berbasis teknologi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyusun kebijakan melalui proses perencanaan teknokratik yang disinergikan dengan perencanaan partisipatif. Setiap tahapan perumusan dimulai dari pengumpulan data lapangan, pengkajian kebutuhan petani, hingga forum konsultasi publik. Selain itu, dinas juga berkoordinasi dengan perangkat daerah lain seperti Bappelitbangda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat integratif. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum OPD, kebutuhan riil petani disuarakan secara langsung, kemudian diterjemahkan ke dalam program kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan maupun jangka menengah.

Kebijakan penyediaan alsintan dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas sumber daya manusia petani, dan keterjangkauan biaya operasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya menyalurkan bantuan alsintan, tetapi juga merancang kebijakan pembinaan teknis dan pemeliharaan berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi ketergantungan tenaga kerja manual, serta mempercepat waktu tanam dan panen. Strategi ini menjadi penting karena perkembangan alsintan terbukti mampu mendorong produktivitas dan meningkatkan

daya saing sektor pertanian di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Kebijakan hortikultura diarahkan pada penguatan komoditas strategis seperti cabai, tomat, dan bawang merah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar stabil. Pemerintah Kabupaten Pinrang melakukan pemetaan kawasan hortikultura berbasis agroekologi untuk menentukan lokasi yang cocok dalam pengembangan komoditas unggulan. Di samping itu, dukungan terhadap pengembangan hortikultura juga dituangkan dalam bentuk pelatihan budidaya, fasilitasi benih unggul, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tani dan irigasi. Pendekatan kebijakan yang menyeluruh ini diharapkan dapat memperbaiki rantai pasok hortikultura sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Kebijakan tanaman pangan di Kabupaten Pinrang menekankan pada pencapaian swasembada beras dan diversifikasi pangan lokal. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan bantuan dari pusat, tetapi juga mengembangkan skema insentif lokal seperti subsidi benih dan pupuk, pengembangan varietas unggul lokal, serta pembentukan cadangan pangan daerah. Strategi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian petani dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Selain itu, melalui program Sekolah Lapang dan Klinik Tanaman, petani diajak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan teknis yang berdampak langsung terhadap hasil produksi mereka.

Dengan demikian, perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan alsintan di Kabupaten Pinrang mencerminkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan pertanian yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Meski masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, namun dengan desain

kebijakan yang inklusif dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan pro-petani. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyentuh kebutuhan riil petani dan memberikan dampak yang terukur terhadap kesejahteraan mereka.

Penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kapasitas petani dalam penerapan teknologi dan praktek pertanian yang baik

Penyuluhan pertanian di Kabupaten Pinrang telah menjadi pilar utama dalam strategi peningkatan kapasitas petani. Pemerintah daerah menyadari bahwa perkembangan teknologi pertanian tidak akan memberi dampak signifikan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan petani dalam memahami, menerima, dan menerapkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Dalam pendekatan ini, petani diajak berdialog dan didampingi secara langsung untuk memahami manfaat dan cara kerja dari inovasi pertanian seperti pemanfaatan benih unggul, sistem tanam jajar legowo, hingga pengelolaan hama terpadu. Hal ini menjadi langkah awal yang sangat strategis dalam menjembatani kesenjangan antara sains dan praktik di lapangan.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan mencakup berbagai metode, mulai dari pertemuan kelompok tani, demonstrasi cara, kunjungan lapangan, hingga bimbingan teknis di lahan usaha tani. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pinrang secara aktif mengerahkan penyuluh-penyuluh lapangan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan teknis untuk mendampingi kelompok tani secara berkala. Materi penyuluhan dirancang sesuai kebutuhan spesifik masing-masing wilayah dan komoditas, sehingga relevansi antara teori

dan praktik diharapkan lebih terjaga. Penyuluhan ini tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga memperkenalkan aspek pertanian ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan ekosistem.

Salah satu contoh keberhasilan penyuluhan pertanian adalah meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola sistem tanam yang efisien dan adaptif terhadap iklim. Petani yang sebelumnya hanya mengandalkan kebiasaan turun-temurun mulai terbuka terhadap teknik baru, seperti penggunaan pupuk organik, irigasi tetes, serta pengendalian hama berbasis hayati. Penyuluhan yang disertai dengan demonstrasi langsung di lapangan mampu memecah kebekuan pengetahuan dan merangsang petani untuk mencoba pendekatan baru. Dalam hal ini, penyuluh pertanian tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial di masyarakat tani.

Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Pinrang juga menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan jumlah penyuluh, belum meratanya kualitas SDM penyuluh, dan minimnya sarana pendukung seperti alat bantu visual dan transportasi. Selain itu, karakteristik petani yang beragam baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, hingga daya tangkap informasi menuntut adanya variasi pendekatan dalam metode penyuluhan. Beberapa wilayah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri karena akses yang sulit dan terbatasnya infrastruktur pendukung. Untuk mengatasi hal ini, Dinas terkait telah mencoba mengoptimalkan peran teknologi digital dan menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi serta LSM lokal.

Pemerintah daerah juga berupaya untuk memperkuat posisi kelembagaan penyuluhan melalui revitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan pemberdayaan kelompok tani sebagai mitra strategis. Kegiatan penyuluhan tidak lagi dipandang sebagai beban tugas

rutin, melainkan menjadi bagian dari sistem pendampingan berkelanjutan yang memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Penilaian dilakukan terhadap perubahan perilaku petani, peningkatan produktivitas, serta adopsi teknologi baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan bukan hanya ditentukan dari frekuensi kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan petani dalam proses produksi dan peningkatan pendapatannya.

Kontribusi penyuluhan juga tercermin dalam semakin meningkatnya partisipasi petani dalam kegiatan pelatihan dan program pemerintah. Penyuluh menjadi penghubung penting antara petani dan institusi penyedia bantuan, seperti lembaga perbankan, dinas pertanian, maupun distributor sarana produksi pertanian. Informasi tentang akses pembiayaan, jadwal tanam, dan program asuransi pertanian disampaikan secara langsung melalui kegiatan penyuluhan. Dalam hal ini, penyuluhan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis petani, tetapi juga memperkuat kapasitas manajerial dan daya saing usaha tani secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian memiliki peran sentral dalam membangun kapasitas dan kemandirian petani di Kabupaten Pinrang. Melalui pendekatan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, penyuluhan menjadi motor penggerak transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh, memperluas cakupan wilayah, serta memperkuat dukungan kelembagaan agar fungsi penyuluhan benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Menyediakan sarana dan prasarana pertanian

Sarana dan prasarana merupakan komponen vital dalam pembangunan

pertanian karena berfungsi sebagai penopang utama bagi efektivitas dan efisiensi usaha tani. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, menyadari bahwa keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan serta keterjangkauan alat dan infrastruktur pendukung. Sarana pertanian mencakup benih unggul, pupuk, pestisida, serta peralatan tanam, sedangkan prasarana meliputi irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan hasil panen, dan akses transportasi pertanian. Strategi penyediaan fasilitas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat proses mekanisasi pertanian dan mengurangi ketergantungan terhadap metode tradisional.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menyediakan alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, cultivator, dan alat panen modern yang disalurkan kepada kelompok tani secara bertahap. Distribusi alsintan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan wilayah dan kebutuhan riil petani di lapangan. Kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diberikan prioritas dengan pertimbangan kematangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan. Pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa benih unggul bersertifikat, pupuk subsidi, serta pestisida ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Selain alat dan bahan pertanian, perhatian juga difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur penunjang seperti irigasi tersier, jalan tani, serta embung dan tangki air untuk mendukung kegiatan usaha tani di wilayah tadah hujan. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan siklus produksi pertanian menjadi lebih stabil dan tahan terhadap ancaman perubahan iklim. Pemerintah juga menggandeng Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk memastikan bahwa petani tidak hanya menerima sarana, tetapi juga mendapat pendampingan teknis dalam penggunaan dan pemeliharaan peralatan tersebut. Keterpaduan antara bantuan fisik dan peningkatan kapasitas petani menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program ini.

Namun demikian, tantangan dalam penyediaan sarana dan prasarana masih cukup kompleks. Beberapa petani mengeluhkan keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaksesuaian spesifikasi alsintan dengan kondisi lahan, serta kurangnya pelatihan teknis dalam pengoperasian alat. Selain itu, pemeliharaan alat pertanian sering kali diabaikan karena keterbatasan biaya operasional dan rendahnya kesadaran anggota kelompok tani. Infrastruktur jalan tani di beberapa daerah juga masih rusak dan belum memadai, sehingga menghambat distribusi hasil panen. Dalam konteks ini, evaluasi rutin dan pemetaan kebutuhan berbasis data menjadi penting agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran dan bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat melalui dana DAK dan APBN. Oleh karena itu, strategi kolaboratif dengan sektor swasta dan lembaga keuangan diperkuat untuk menyediakan pembiayaan alternatif dan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pembangunan infrastruktur pertanian. Sementara itu, untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga teknis, dilakukan peningkatan kapasitas aparat lapangan serta pelibatan mahasiswa magang dari perguruan tinggi pertanian untuk mendampingi petani dalam penggunaan sarana modern.

Terlepas dari hambatan yang ada, berbagai indikator menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pertanian telah memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efisiensi usaha tani di Kabupaten Pinrang. Petani yang mendapatkan

akses terhadap alsintan dan infrastruktur irigasi lebih mampu meningkatkan intensitas tanam, menekan biaya tenaga kerja, serta meminimalkan kerugian pasca panen. Program bantuan ini juga menciptakan semangat kolektif dalam pengelolaan kelompok tani karena tanggung jawab terhadap peralatan dilakukan secara gotong royong. Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kuantitas bantuan, tetapi juga oleh tata kelola yang transparan dan partisipatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pertanian merupakan langkah krusial dalam upaya pemberdayaan petani dan peningkatan ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran, perencanaan yang berbasis kebutuhan, serta pelibatan multi-stakeholder dalam pelaksanaan program. Ke depan, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antar sektor serta sistem evaluasi berbasis teknologi informasi agar bantuan pertanian benar-benar menyentuh akar permasalahan dan menjadi instrumen perubahan yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah menunjukkan peran aktif dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya pada aspek perumusan kebijakan, penyuluhan pertanian, dan penyediaan sarana-prasarana. Kebijakan yang dirumuskan telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal, meskipun masih menghadapi kendala pada implementasi teknis. Kegiatan penyuluhan berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas petani, namun tantangan seperti keterbatasan jumlah penyuluh masih menjadi hambatan. Sementara itu, penyediaan sarana dan prasarana telah berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas petani, meskipun

memerlukan pendampingan teknis lanjutan. Secara umum, ketiga aspek ini menggambarkan adanya upaya sistematis dari pemerintah daerah dalam memberdayakan petani, namun masih dibutuhkan strategi terpadu dan peningkatan kelembagaan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Pearson Education, Inc.
- Badan Pusat Statistik (2023) Kabupaten Pinrang
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Campbell, A. (2005). Agricultural Systems: A Historical and Philosophical Perspective. *Agricultural Systems*, 84(3), 389-400.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Haryanto, T. (2019). Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 7(2), 98-110.
- Henson, S., & Heasman, M. (1998). Food Safety Regulation: An Instrumental Perspective on the Role of Government. *Journal of Economic Literature*, 36(4), 1936-1955.
- Johnston, R., & Mellor, J. W. (1976). The Role of Agriculture in Economic Development. *The American Economic Review*, 66(2), 131-137.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Pedoman Umum Program Pertanian Terpadu*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Ruthenberg, H. (1971). *Farming Systems in the Tropics*. Clarendon Press.
- Rasyid, M. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Sebuah Perspektif Baru*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations* (3rd ed.). New York: Free Press.
- Setiawan, I. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 4(1), 12-24.
- Suharto, E. (2020). *Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, & Junaidi, H. (2020). Pendekatan Sistem dalam Pertanian Terpadu. *Jurnal Agrikultura*, 15(1), 15-28.
- Sugiarto, M., & Purnamasari, N. (2021). Kualitas Layanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 42-59.